# RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasai dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasai dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai pedoman bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik tahun ke depan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah pemekaran dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk pada awal tahun, sehingga dokumen renja yang disusun ini merupakan kelanjutan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Dokumen Renja ini akan memuat perencanaan dengan masa kelanjutan dari periode Renstra yang ada, yakni memuat perencanaan tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya.

Nganjuk, 22 Juli 2022
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**CUK WIDIYANTO, S.H., M.M.**
Pembina Tingkat I
NIP : 19660507 199203 1 013

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... iii
BAB I..... 1
PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan..... 7
BAB II..... 9
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU ..... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ..... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 47
BAB III ..... 56
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK..... 56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 56
3.3 Program dan Kegiatan..... 57
BAB IV ..... 71
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 74
BAB V ..... 83
PENUTUP ..... 83
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 83
5.2 Rencana Tindak Lanjut ..... 84

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

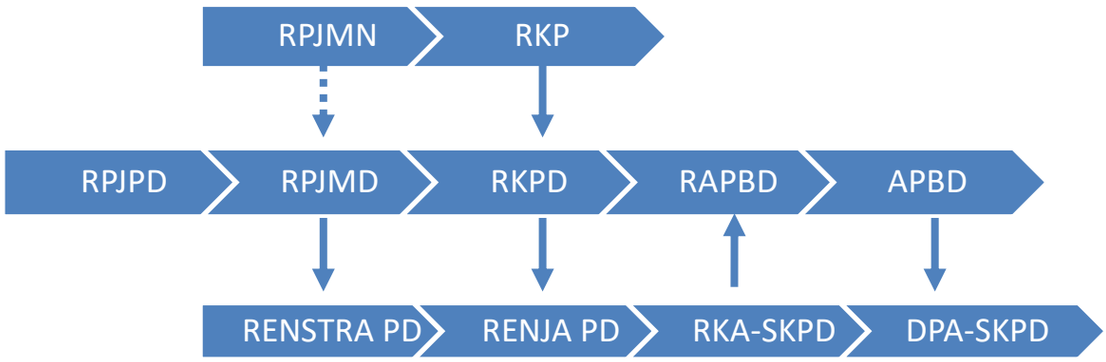
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran




Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

# BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk, maka untuk mengetahui capaian kinerjanya harus dilihat dari program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebelumnya sebelum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Oleh sebab itu kita perlu menilik dan mencermati capaian kinerja melalui pelaksanaan Program, Kegiatan, maupun Subkegiatan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 17 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | | Dokumen | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 100% | 7 Laporan | 7 Laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai | - | - | - | - | - | - | - | 88% |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 32 orang/ bulan | 32 orang/ bulan | 32 orang/ bulan | 32 orang/ bulan | 100% | 20 orang/ bulan | 20 orang/ bulan | 85% |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | 100% | 18 Laporan | 18 Laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan penatausahaan barang | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 3 laporan | 3 laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | 1unit | 1unit | 1unit | 1unit | 100% | 1unit | 1unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 paket | 6 paket | 6 paket | 6 paket | 100% | 6 paket | 6 paket | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100% | 2 paket | 2 paket | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 100% | 3 laporan | 3 laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 13 Unit | 100% | 13 Unit | 13 Unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 100% | 6 unit | 6 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 100% | 6 unit | 6 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 100% | 8 unit | 8 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 100% | 5 unit | 5 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laopran penyediaan jasa | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | surat menyurat | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 7 laporan | 100% | 7 laporan | 7 laporan | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | - | - | - | - | - | | | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 100% | 5 unit | 5 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 100% | 5 unit | 5 unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 5 Unit | 5 Unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 100% | 15 Unit | 15 Unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 2 | 17 | 03 | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Diawasi | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Diawasi | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, | jumlah koperasi yangtelah dilakukan | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 100% | 20 unit | 20 unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | usaha | usaha | usaha | usaha | | usaha | usaha | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 100% | 50 unit usaha | 50 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 04 | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Dinilai | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Dinilai | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 100 unit usaha | 100 unit usaha | 100 unit usaha | 100 unit usaha | 100 % | 100 unit usaha | 100 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan | 9 unit usaha | 9 unit usaha | 9 unit usaha | 9 unit usaha | 100 % | 9 unit usaha | 9 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 05 | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 % | 100 orang | 100 orang | 100% |
| 2 | 17 | 06 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah koperasi yang Difasilitasi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi | 20 unit usaha | 20 unit usaha | 20 unit usaha | 20 unit usaha | 100 % | 20 unit usaha | 20 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 07 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO** | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | - | - | - | - | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | - | - | - | - | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, resstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | 160 unit usaha | - | - | - | - | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | 1 unit usaha | 160 unit usaha | 160 unit usaha | 160 unit usaha | 100% | 160 unit usaha | 160 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 2 unit usaha | 1 unit usaha | 1 unit usaha | 1 unit usaha | 100% | 1 unit usaha | 1 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 08 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | 20 orang | 2 unit usaha | 2 unit usaha | 2 unit usaha | 100% | 2 unit usaha | 2 unit usaha | 100% |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase Pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | - | - | - | - | | | |
| | | | | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolaghan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi | 4 unit usaha | 4 unit usaha | 4 unit usaha | 4 unit usaha | 100% | 4 unit usaha | 4 unit usaha | 100% |

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | **≥ 91%** | Sangat Tinggi |
| 2. | **76% ≤ 90%** | Tinggi |
| 3. | **66% ≤ 75%** | Sedang |
| 4. | **51% ≤ 65%** | Rendah |
| 5. | **≤ 50%** | Sangat Rendah |

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

| Program Perangkat Daerah | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 85% | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| 1. Terbatasnya Pegawai ASN di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro<br>2. Belum adanya | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja dan Beberapa kegiatan tidak bisa | Memaksimalkan pagu anggaran yang terbatas untuk capaian kinerja dan pengajuan penambahan ASN. |

| | | |
|---|---|---|
| kendaraan Dinas bagi ASN | terlaksananya secara maksimal | |
| Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 20% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Karena Proses Kegiatan pada program tersebut dilaksanakan pada triwulan II maka kegiatan saat ini sedang berlangsung adapun kegiatan tersebut yaitu:<br>1. Kunjungan dari Tim Pengawasan dianggap intervensi<br>2. Ketersediaan data-data pendukung administrasi yang dimiliki koperasi masih belum lengkap<br>3. Kepatuhan koperasi terhadap Regulasi Perkoperasian kurang update<br>4. Semua koperasi belum mengenal aplikasi SIMAPKOP & SIPENAKOP | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja<br>1. Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi berjalan sesuai dengan jadwal meskipun koperasi yang diawasi hasilnya belum maksimal<br>2. Dibentuknya Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Karena proses kegiatan masih berjalan maka dirarapkan target akan terpenuhi setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai<br>1. Diberikan edukasi tentang Pengawasan Permenkop No. 9 Tahun 2020 melalui Kegiatan Sosialisaasi<br>2. Menyediakan buku-buku administrasi dan pendampingan untuk pengerjaan<br>3. Melakukan Sosialisasi mengenai Aplikasi SIMAPKOP dan SIPENAKOP<br>4. Melaksanakan BIMTEK Implementasi Aplikasi SIMAPKOP dan SIPENAKOP<br>5. Pengoptimalan keberadaan Forum |

| | | |
|---|---|---|
| | | untuk mensosialisasikan Regulasi Perkoperasian terbaru |
| Program Penilaian Kesehatan Koperasi | 21 % | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| 1. Koperasi yang dinilai Kesehatan koperasinya tidak memberikan informasi koperasinya dengan terbuka<br>2. Ada beberapa koperasi yang menolak untuk dilakukannya Penilaian Kesehatan Koperasi dikarenakan adanya pandemic covid 19<br>3. Ketersediaan SDM dan Anggaran untuk kegiatan Penilaian Kesehatan sehingga hanya dipilih 2 koperasi dari setiap kecamatan yang dinilai | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi yang dilakukan masih belum bisa menjangkau dan menilai semua koperasi yang aktif atau koperasi yang telah melaksanakan RAT. Pada tahun ini, hanya ada beberapa koperasi yang dilakukan penilaian Kesehatan koperasi | 1. Sosialisasi tentang Penilaian Kesehatan Koperasi<br>2. Memberikan informasi melalui surat resmi tentang Pelaksanaan Kesehatan koperasi<br>3. Mengalihkan target koperasi yang dinilai<br>4. Kegiatan Penilaian Kesehatan dilakukan secara bergilir |
| Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 15% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tidak mendapatkan tempat pelaksanaan<br>2. Rincian belanja pada DPA tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan<br>3. Ketidaktersediaan narasumber yang berkompeten di dalam Kabupaten<br>4. Narasumber kurang komunikatif<br>5. Tidak semua pengurus/pengawas ikut andil dalam kegiata Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan oleh Dinas masih belum bisa diterapkan dan dilakukan oleh pengurus/pengawas yang menghadiri kegitan tersebut | 1. Berkoordinasi dengan UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim<br>2. Berkoordinasi dengan instansi yang memiliki Aula yang cukup efisien untuk menunjang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut<br>3. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim serta mencari alternatif narasumber lain<br>4. Menyusun tema pelatihan yang menarik dan komunikatif<br>5. Menghadirkan pengurus/pengawas koperasi melalui Forum Koperasi yang telah ada |
| Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | 21% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Masih minimnya jaringan akses pasar | Pemasaran produk koperasi kurang | Karena proses kegiatan masih berjalan maka |

| | | |
|---|---|---|
| untuk menambah modal dan perluasan jaringan koperasi | maksimal | dirarapkan target akan terpenuhi setelah seluruh pelaksanaan kegiatan selesai |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro | - | - |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Minimnya ketrampilan sumber daya menusia(SDM) | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan pelatihan karena kurang antusiasmya masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan | 1. Sosialisasi tentang kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan<br>2. Memberikan sosialisasi/pelatihan ilmu rugi laba |
| Program Pengembangan UMKM | - | - |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Minimnya ketrampilan sumber daya menusia(SDM) | Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja hasil dari kegiatan pelatihan karena kurang antusiasmya masyarakat terhadap pelatihan yang diberikan | 1. Memberikan informasi terkait pemasaran produk pelaku usaha mikro<br>2. Menbantu pemasaran produk agar pelaku usaha mikro naik kelas |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

| No. | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi Realisasi | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| I. | Urusan Pemerintah Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk |
| 1 | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi | | | 36% | 37% | 38% | 39% | 35,70 % | 24,24 % | | |
| 2 | Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro | | | 35% | 40% | 45% | 50% | 57,50 % | 46,46 % | | |
| 3 | Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern | | | 45 % | 50 % | 55 % | 60 % | 111,11 % | 114,29 % | | |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi dan usaha mikro maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang berpotensi dihadapi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Pengawas Koperasi
2. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif
3. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
4. Masih rendahnya pemahaman koperasi tentang regulasi perkoperasian
5. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha
6. Rendahnya daya saing produk lokal

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Pengusulan tenaga fungsional Pengawas Koperasi
2. Peningkatan jumlah koperasi aktif
3. Peningkatan jumlah koperasi sehat
4. Peningkatan Volume Usaha Koperasi
5. Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di koperasi

6. Peningkatan intensitas Tim Pengawasan terhadap Koperasi
7. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha
8. Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro

### 2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk difokuskan dengan peningkatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Nganjuk. Dengan kata lain fungsi Dinas Koperasi dan Usha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat dengan cara tidak langsung, atau dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Nganjuk.

### 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**.**

Permasalahan yang berpotensi dihadapi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Pengawas Koperasi
2. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif
3. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
4. Masih rendahnya pemahaman koperasi tentang regulasi perkoperasian
5. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha
   Rendahnya daya saing produk local

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)"**, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-4 serta sasaran strategis daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi;
2. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas; dan
3. Peningkatan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang masuk pasar modern.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.6

Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2021

| No. | Tujuan/Target/Indikator | Satuan | Baseline (2018) | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1. | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1) | | | | | | | | | |
| | Mendorong dan meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi untuk meningkatkan Volume Usaha Koperasi | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi | % | 4,06% | 4,75% | 4,37% | 5,25% | 36,89% | 5,50% | | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2. | Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17) | | | | | | | | | |
| | Mendorong dan meningkatkan kerjasama pelaku usaha mikro dengan pengelola pasar modern untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro | | | | | | | | | |
| | Persentase pertumbuhan usaha mikro yang masuk pasar modern | % | 35% | 40% | 270.75% | 45% | 80% | 50% | 105.56% | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2021

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk memberikan kontibusi terhadap tujuan ke-1 “Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun”. Yang mana diwujudkan dengan program, kegiatan, maupun subkegiatan dengan Outcome “Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro”. Dengan kualitas kelembagaan koperasi sehat, usaha mikro yang berdaya saing dan pertumbuhan pelaku usaha mikro, dimaksudkan bahwa masyarakat yang menjadi anggota koperasi maupun masyarakat yang memiliki usaha mikro dapat meningkatkan taraf ekonominya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya menjamin / meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi maupun usaha mikro. Dengan meningkatnya kapasitas, kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, diharapkan masyarakat yang menjadi anggota koperasi maupun pelaku usaha mikro dapat mencapai taraf hidup yang baik dan terhindar dari segala bentuk kemiskinan. Pada Bidang Usaha Mikro, merujuk pada tujuan pertama mempunyai sasaran untuk Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dan Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern pada masyarakat yang sejahtera dalam segi perekonomian.

Strategi Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas. Dengan mengacu pada strategi tersebut diharapkan bisa mendorong terbentuknya sumber ekonomi mandiri dalam bentuk munculnya para wirausaha baru, dan peningkatan fasilitasi kemitraan dengan para pemangku kepentingan serta fasilitasi untuk promosi hasil produksi dari para pelaku usaha mikro. Apabila arah strategi tersebut bisa dilaksanakan dan tercapai maka harapannya akan mendapatkan hasil positif yaitu hilangnya angka kemisikinan di Kabupaten Nganjuk.

### 2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk meliputi:

1. Tantangan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, tidak terlepas dengan adanya tantangan baik dari internal maupun eksternal. Dari Faktor Internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dapat diidentifikasikan beberapa tantangan sebagai berikut:

a. Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
b. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
c. Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
d. Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi
e. Masih kurang terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja
f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan dinas yang baru terbentuk.

Dari Faktor Eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dapat diidentifikasikan beberapa tantangan sebagai berikut:

a. Persaingan produk sejenis dari luar daerah
b. Peningkatkan daya saing produk dari para pelaku usaha mikro
c. Masih terbatasnya akses pasar ke pasar-pasar modern di luar Kabupaten Nganjuk untuk memasarkan produk pelaku usaha mikro
d. Masih rendahnya kemampuan IT pelaku usaha mikro untuk memasarkan produk melalui *digital marketing*
e. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi SKKNI)
f. Rendahnya partisipasi anggota koperasi terhadap perkembangan koperasi.
g. Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi di masyarakat
h. Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis
i. Kurangnya pemahaman regulasi dari stakeholder koperasi maupun usaha mikro

2. Peluang

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, tidak terlepas dengan adanya tantangan baik dari internal maupun eksternal. Namun begitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten tetap memiliki peluang yang dapat diusahakan untuk dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik itu dari internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Dari Faktor Internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dapat diidentifikasikan beberapa peluang, sebagai berikut:

a. Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan pengembangan koperasi dan usaha mikro, karena masih banyaknya penduduk usia produktif yang memerlukan penghasilan sehingga dimungkinkan untuk tumbuh kembangnya koperasi sebagai wahana untuk pengembangan usaha;
b. Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;
c. Potensi Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kawasan industri alternatif diharapkan mampu menumbuhkan usaha mikro baru
d. Terbentuknya forum/ grup Usaha Mikro di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk sehingga mempermudah untuk pembagian informasi dan berkoordinasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro

Dari Faktor Eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, dapat diidentifikasikan beberapa peluang, sebagai berikut:

a. Tersedianya pangsa pasar modern untuk memperluas akses pasar produk-produk koperasi maupun usaha mikro.
b. Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya ke Kabupaten Nganjuk dan ini mendorong tumbuh kembang wira usaha baru untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi tenaga kerja di industri tersebut.
c. Tingginya minat pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian dan usaha mikro.
d. Jumlah dan potensi (tumbuhnya) Usaha Mikro cukup besar
e. Keberadaan forum komunikasi (Forkom) Koperasi dan Usaha Mikro sebagai sarana komunikasi untuk pengembangan usaha
f. Banyaknya even pameran/promosi bagi Usaha Mikro
g. Banyaknya jumlah koperasi

Teknologi informasi yang semakin maju untuk mendukung kegiatan koperasi dan usaha mikro

### 2.3.5 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi dan usaha mikro maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang berpotensi dihadapi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Pengawas Koperasi
2. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif
3. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
4. Masih rendahnya pemahaman koperasi tentang regulasi perkoperasian
5. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha
6. Rendahnya daya saing produk lokal

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Pengusulan tenaga fungsional Pengawas Koperasi

2. Peningkatan jumlah koperasi aktif
3. Peningkatan jumlah koperasi sehat
4. Peningkatan Volume Usaha Koperasi
5. Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di koperasi
6. Peningkatan intensitas Tim Pengawasan terhadap Koperasi
7. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha
8. Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan Dinas yang baru ditetapkan. Dengan kondisi tersebut tentunya banyak permasalahan yang akan dihadapi, khususnya tentang hal-hal pendukung untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Infrastruktur menjadi isu yang penting terhadap dinas yang baru terbentuk, mulai dari tempat atau gedung yang akan ditempati untuk menjalankan tugas aparatur sipil Dinas Koperasi dan Usha Mikro Kabupaten Nganjuk, kemudian kendaraan untuk dipergunakan sebagai operasional, sampai dengan fasilitas elektronik berupa komputer, printer, dan lain sebagainya.

Dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan dinas baru, tentunya akan diikuti dengan adanya penataan jabatan, struktur, dan fungsi pegawai. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat.

Disamping isu di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk juga menghadapi isu strategis berupa upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut secara langsung menjadi isu yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk memiliki tujuan utama untuk mengembangkan koperasi yang memiliki tujuan utama mensejahterakan anggotanya, dan mengembangkan usaha mikro secara umum. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor mayoritas dalam dunia usaha di Indonesia yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lebih dari 90 %.

### 2.3.6 Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Juni 2022




Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi”.**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

## Telaah Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

| No. | Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 | | | | | Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | | | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidaksesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Pagu Indikatif | Ada | Tidak | | |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | | 85 % | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | 85% | | | | | |
| a | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | | | | | | |
| i | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | dokumen | 1 | 2,405,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 12,500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | 2,405,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iii | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | dokumen | 1 | 1,640,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iv | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan | Dokumen | 1 | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan | dokumen | 1 | 1,640,000.00 | | v | Tidak sesuai | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | | | | SKPD | laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | | | | | PAGU | |
| v | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | 1,640,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| vi | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan | 7 | 10,000,000 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | laporan | 7 | 1,640,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| vii | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 10,000,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | | 10,000,000.00 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| b | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai | | | | | | | |
| i | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang/bulan | 32 | 4,500,000,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya kebutuhan tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | orang/bulan | 20 | 4,385,207,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan | Laporan | 18 | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan | Laporan | 18 | 10,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | | | | | | | |
| c | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui | | | | | | | |
| i | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 10,000,000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9,507,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan penatausahaan barang | laporan | 3 | 10,000,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan penatausahaan barang | laporan | 3 | 3,600,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| d | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | | | | | | |
| i | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | unit | 1 | 12,500,000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | unit | 1 | 600,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 4 | 20,000,000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 4 | | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| e | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | | | | | | | |
| i | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 1 | 150,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | paket | 1 | 542,500 | v | | | |
| ii | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor | Paket | 1 | 65,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | paket | 1 | 172,000 | v | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | yang disediakan | | | | | kantor yang disediakan | | | | | | | |
| iii | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 6 | 60,000,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 6 | 18,418,900 | v | | | |
| iv | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 2 | 30,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 2 | 25,710,720 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| v | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | dokumen | 2 | 12,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | dokumen | 2 | 2,400,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| vi | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 15,000,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 10,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| vii | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 3 | 150,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 3 | 68,410,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| viii | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | dokumen | 3 | 30,000,000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | dokumen | 3 | 9,260,000 | v | | | |
| ix | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 5 | - | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 5 | 50,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| f | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | | | | |
| i | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 13 | 500.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 13 | 946.000.000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ii | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | unit | 6 | 100,000,000 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | unit | 6 | 21,600,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iii | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | unit | 6 | 150,000,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | unit | 6 | 75,596,000 | v | | | |
| iv | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | unit | 8 | 35,000,000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | unit | 8 | 38,100,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| v | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | unit | 5 | 35,000,000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | unit | 5 | 35,247,900 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| g | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | | | | | | | |
| i | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat | laporan | 2 | 25,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat | laporan | 2 | 8,144,000 | v | | | |
| ii | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 2 | 85,000,000 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 2 | 78,000,000 | v | | | |
| iii | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakanxxx | laporan | 7 | 60,000,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakanxxx | laporan | 7 | 247,248,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| h | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | | | | | | |
| | Penyediaan jasa | jumlah kendaraan | unit | 5 | 65,000,000 | Penyediaan jasa | jumlah kendaraan | unit | 5 | 34,472,280 | | | Tidak | PAGU |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | v | sesuai PAGU | Terbatas |
| ii | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 5 | 65,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 5 | 12,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iii | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 20,000,000 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 7,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iv | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 50,000,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 20,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| v | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 100,000,000 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 150,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| vi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi | unit | 1 | 47,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi | unit | 1 | 40,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| 2 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Diawasi | | 20 % | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Diawasi | | 20% | | v | | | |
| a | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Diawasi | | | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah** | Jumlah Koperasi yang Diawasi | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kabupaten/Kota** | | | | | | | | |
| i | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah koperasi yangtelah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | unit usaha | 20 | 350,000,000 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah koperasi yangtelah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | unit usaha | 20 | 28,911,500 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundanga n kewenangan kabupaten/ kota kinerja | unit usaha | 50 | 300,000,000 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundanga n kewenangan kabupaten/ kota | unit usaha | 50 | 32,012,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| 3 | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Dinilai | | 21 % | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Dinilai | | 21% | | v | | | |
| a | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Dinilai | | | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Dinilai | | | | | | | |
| i | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | unit usaha | 100 | 100,000,000 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | unit usaha | 100 | 21,718,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatakan penghargaan kesehatan | unit usaha | 9 | 240,000,000 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan | Jumlah koperasi yang mendapatakan penghargaan kesehatan | unit usaha | 9 | 51,740,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 4 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | 15 % | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | 15% | | v | | | |
| a | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | | | | | | |
| i | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | orang | 100 | 600,000,000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | orang | 100 | 69,795,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| 5 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | | 21% | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | | 21% | | v | | | |
| a | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah koperasi yang Difasilitasi | | | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah koperasi yang Difasilitasi | | | | | | | |
| i | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | unit usaha | 20 | 650,000,000 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | unit usaha | 20 | 15,321,300 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 6 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO** | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO** | | | | | | | | |
| a | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | |
| i | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, resstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | unit usaha | 160 | 130,000,000 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, resstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | unit usaha | 160 | 10,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| ii | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | unit usaha | 1 | 165,168,750 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | unit usaha | 1 | 20,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |
| iii | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha | unit usaha | 2 | 300,000,000 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan | unit usaha | 2 | 32,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mikro | | | | | terhadap usaha mikro | | | | | | | |
| iv | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | orang | 20 | 10,000,000 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | orang | 20 | 5,000,000 | v | | | |
| 7 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase Pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | |
| a | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | |
| i | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi | unit usaha | 4 | 700,000,000 | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolaghan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi | unit usaha | 4 | 35,000,000 | | v | Tidak sesuai PAGU | PAGU Terbatas |

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nganjuk | | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Nganjuk | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | - |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nganjuk | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nganjuk | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Nganjuk | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Nganjuk | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi | 1 Dokumen | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | penyusunan dokumen DPA-SKPD | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Nganjuk | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | - |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 Laporan | - |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Nganjuk | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | - |
| | **AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah** | Nganjuk | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai | | - |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nganjuk | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 orang/bulan | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | - |
| | **AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Nganjuk | Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui | | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nganjuk | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 laporan | - |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan penatausahaan barang | 3 Laporan | - |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Nganjuk | Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | - |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Nganjuk | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | 1 unit | - |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Nganjuk | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | - |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nganjuk | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | | - |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nganjuk | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | - |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nganjuk | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | - |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nganjuk | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 Laporan | - |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nganjuk | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | - |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nganjuk | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 2 dokumen | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nganjuk | Jumlah Laporan Fasilitasi | 5 Laporan | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Kunjungan Tamu | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nganjuk | Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 laporan | - |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nganjuk | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 3 dokumen | - |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nganjuk | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | - |
| | **PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | - |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nganjuk | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 13 Unit | - |
| | Pengadaan Mebel | Nganjuk | Jumlah paket mebel yang disediakan | 6 unit | - |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 6 unit | - |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nganjuk | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 8 unit | - |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nganjuk | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 5 unit | - |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nganjuk | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah | | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | daerah yang disediakan | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nganjuk | Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat | 2 laporan | - |
| | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nganjuk | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | - |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nganjuk | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 7 laporan | - |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | - |
| | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nganjuk | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 5 unit | - |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nganjuk | jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5 unit | - |
| | Pemeliharaan Mebel | Nganjuk | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | - |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | - |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nganjuk | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | - |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nganjuk | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / | 1 unit | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | rehabilitasi | | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Nganjuk | Persentase Koperasi yang Diawasi | 20 % | - |
| | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Nganjuk | Jumlah Koperasi yang Diawasi | 205 koperasi | - |
| | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Nganjuk | jumlah koperasi yangtelah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | 20 unit usaha | - |
| | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja | 50 unit usaha | - |
| | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI** | Nganjuk | Persentase Koperasi yang Dinilai | 21 % | - |
| | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Nganjuk | Jumlah Koperasi yang Dinilai | | - |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan | Nganjuk | Jumlah unit usaha koperasi | 100 unit usaha | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | KSP/USP Koperasi KewenanganKabupaten/Kota | | yang telah dilakukan penilaian kesehatan | | |
| | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Nganjuk | Jumlah koperasi yang mendapatakan penghargaan kesehatan | 9 unit usaha | - |
| | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Nganjuk | PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | 15 % | - |
| | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Nganjuk | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | - |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Nganjuk | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 100 orang | - |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Nganjuk | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | 21 % | - |
| | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Nganjuk | Jumlah koperasi yang Difasilitasi | | - |
| | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi | Nganjuk | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 20 unit usaha | - |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO** | Nganjuk | Persentase Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berlegalitas | | |
| | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Nganjuk | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, resstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | 160 unit usaha | |
| | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Nganjuk | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | 1 unit usaha | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM | Nganjuk | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 2 unit usaha | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM | Nganjuk | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi | 20 orang | |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | Persentase Pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | |
| | Pengembangan Usaha mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern | | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi | Nganjuk | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi | 4 unit usaha | |

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2021

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "**Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro**", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya volume usaha koperasi, Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dan Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

| Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro | Jumlah koperasi sehat | 39 % |
| | Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro | 50% |
| | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern | 60 % |
| **Sasaran Perangkat Daerah** | **Indikator Kinerja** | **Target Tahun 2022** |
| Meningkatnya Volume Usaha Koperasi | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi | 6,25% |
| Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas | Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro | 6,00% |
| Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern | Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern | 7,00% |

## 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

### 3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Target |
|---|---|---|
| 1. | Pelayanan Konsultasi Penyusunan Neraca | 100% |
| 2. | Pelayanan Pendampingan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi | 100% |
| 3. | Pelayanan Konsultasi Pendirian dan Pembubaran Koperasi | 100% |
| 4. | Pelayanan Konsultasi Permasalahan Koperasi dengan Anggota | 100% |
| 5. | Pelayanan Advokasi Koperasi | 100% |
| 6. | Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | 100% |
| 7. | Pelayanan peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (Pendidikan dan Pelatihan) | 100% |
| 8. | Pelayanan Konsultasi Legalitas usaha dan produk pelaku usaha mikro | 100% |
| 9. | Pelayanan Konsultasi permodalan pelaku usaha mikro | 100% |
| 10. | Pelayanan Peningkatan Akses pasar bagi pelaku usaha mikro | 100% |
| 11. | Pelayanan Kerjasama antar pelaku usaha Mikro | 100% |
| 12. | Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM pelaku usaha mikro | 100% |
| 13. | Pelayanan Peningkatan Kapasitas kelembagaan pelaku usaha mikro | 100% |

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

## Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | **6.289.420.599** | | | | | **5.520.510.000** |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **5.912.560.799** | | | | | **5.184.710.000** |
| **2** | **17** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14.354.500** | | | | | **12.500.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.812.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 2.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.990.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 2.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 1.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | hasil survei kepuasan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan | | 85 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | hasil survei kepuasan masyarak | 85 % | 1.700.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | masyarakat (SKM) | Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | perangkat daerah | | | | | | Alokasi Umum | | at (SKM) | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 1.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 7 Laporan | 1 Dokumen | 1.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 1.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | | 85 % | 4 Laporan | 1 Dokumen | 1.992.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) | 85 % | 1.700.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.388.787.000** | | | | | **4.387.210.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | 85 % | 25 Orang/bulan | 25 orang/bulan | 4.385.207.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 4.385.210.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | 85 % | 18 Laporan | 25 orang/bulan | 3.580.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 2.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | **01** | **2,03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **9.358.500** | | | | | **5.700.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah buku inventaris barang yang diperbaharui | | 85 % | 1 Laporan | 1 Buku | 3.358.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 1.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah buku inventaris barang yang diperbaharui | | 85 % | 3 Laporan | 1 Buku | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 4.000.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.745.000** | | | | | **1.900.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | 85 % | 1 Unit | 12 Bulan | 1.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | 85 % | 4 Dokumen | 12 Bulan | 6.545.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 1.200.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **114.873.000** | | | | | **112.000.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Paket | 12 Bulan | 1.498.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 1.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Paket | 12 Bulan | 772.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 200.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 6 Paket | 12 Bulan | 17.996.950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 18.500.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 2 Paket | 12 Bulan | 22.411.700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 25.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 2 Dokumen | 12 Bulan | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 2.500.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Laporan | 12 Bulan | 1.475.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 1.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Laporan | 12 Bulan | 59.355.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 52.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Dokumen | 12 Bulan | 6.563.950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 9.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perangkat daerah | | 10 Paket | 1 Dokumen | 12 Bulan | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | 10 Paket | 1.700.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **881.163.699** | | | | | **187.000.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | 85 % | 1 Unit | 19 Unit | 685.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 21.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | 85 % | 6 Unit | 19 Unit | 72.312.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 21.700.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | 85 % | 6 Unit | 19 Unit | 55.639.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 70.800.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | 85 % | 1 Unit | 19 Unit | 28.704.899 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 38.200.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | 85 % | 5 Unit | 19 Unit | 39.507.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 35.300.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **329.878.000** | | | | | **333.600.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hasil Survei Kepuasan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah | | 85 % | 1 Laporan | 10 Laporan | 8.135.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Hasil Survei Kepuasan | 85 % | 8.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Masyarakat (SKM) | Menyurat | daerah yang disediakan | | | | | | Alokasi Umum | | Masyarakat (SKM) | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | | 85 % | 2 Laporan | 10 Laporan | 78.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 78.100.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | | 85 % | 7 Laporan | 10 Laporan | 243.743.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 247.300.000 |
| **2** | **17** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **166.401.100** | | | | | **144.800.000** |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | 85 % | 1 Unit | 16 Unit | 24.485.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 24.000.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | 85 % | 3 Unit | 16 Unit | 54.966.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 32.200.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung | | 85 % | 5 Unit | 16 Unit | 1.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 1.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | | | | | Umum | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | 85 % | 4 Unit | 16 Unit | 4.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 1.200.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | 85 % | 1 Unit | 16 Unit | 30.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 1.200.000 |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung gedung dinas koperasi dan usaha mikro | | 85 % | 2 Unit | 16 Unit | 51.450.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 85 % | 85.000.000 |
| **2** | **17** | **03** | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | | **57.605.350** | | | | | **65.000.000** |
| **2** | **17** | **03** | **2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **57.605.350** | | | | | **65.000.000** |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diawasi | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase Koperasi Aktif yang mematuhi peraturan perkoperasian | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 % | 205 Unit Usaha | 80 % | 22.226.150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi yang diawasi | 20 % | 30.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diawasi | Jumlah Koperasi Aktif yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Kinerja | Persentase Koperasi Aktif yang mematuhi peraturan perkoperasian | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 % | 205 Unit Usaha | 80 % | 35.379.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi yang diawasi | 20 % | 35.000.000 |
| **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | | | | | **93.890.450** | | | | | **80.000.000** |
| **2** | **17** | **04** | **2.01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **93.890.450** | | | | | **80.000.000** |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang dinilai | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi | Persentase Koperasi yang Mendapatkan Predikat Cukup Sehat / Sehat | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21 % | 100 Unit Usaha | 90 % | 27.136.700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi yang dinilai | 21 % | 25.000.000 |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang dinilai | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | Persentase Koperasi yang Mendapatkan Predikat Cukup Sehat / Sehat | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21 % | 9 Unit Usaha | 90 % | 66.753.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi yang dinilai | 21 % | 55.000.000 |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | | | | | **97.991.600** | | | | | **70.000.000** |
| **2** | **17** | **05** | | **2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **97.991.600** | | | | | **70.000.000** |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian | Persentase koperasi yang dibina | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Persentase pengurus / pengawas yang memahami | Kab. Nganjuk, Semua | 15 % | 100 Orang | 75 % | 97.991.600 | Dana Transfer Umum-Dana | | Persentase koperasi yang dibina | 15 % | 70.000.000 |
| | | | | | serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | pengetahuan perkoperasian | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | | | |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | | | | | **27.372.400** | | | | | **20.000.000** |
| **2** | **17** | **06** | **2.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **27.372.400** | | | | | **20.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Persentase Pengurus / Pengawas Koperasi yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21 % | 20 Unit Usaha | 75 % | 27.372.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentasi koperasi yang Difasilitasi | 21 % | 20.000.000 |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | | | | | **65.000.000** | | | | | **65.700.000** |
| **2** | **17** | **07** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | **65.000.000** | | | | | **65.700.000** |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi tentang pengetahuan dan kewirausahaan | | 14 % | 50 Unit usaha | 50 orang | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | 14 % | 10.100.000 |
| 2 | 17 | 07 | 2.02 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi tentang pengetahuan dan kewirausahaan | | 14 % | 100 Unit Usaha | 50 orang | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | 14 % | 20.200.000 |
| 2 | 17 | 07 | 2.03 | 03 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan | Persentase usaha mikro yang | Jumlah Unit Usaha yang Telah | Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi | | 14 % | 50 Unit Usaha | 50 orang | 30.000.000 | Dana Transfer Umum- | | Persentase usaha mikro | 14 % | 30.300.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengembangan Usaha Mikro | mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | tentang pengetahuan dan kewirausahaan | | | | | | Dana Alokasi Umum | | yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | | |
| 2 | 17 | 07 | 2.04 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi tentang pengetahuan dan kewirausahaan | | 14 % | 20 Orang | 50 orang | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | 14 % | 5.100.000 |
| **2** | **17** | **08** | | | **PRORAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | | | | | **35.000.000** | | | | | **35.100.000** |
| **2** | **17** | **08** | **2.02** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | **35.000.000** | | | | | **35.100.000** |
| 2 | 17 | 08 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pemasaran | | 18 % | 50 Unit Usaha | 50 unit usaha | 35.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan | 18 % | 35.100.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **6.289.420.599** | | | | | **5.520.510.000** |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

| **No.** | **Prioritas Daerah** | **Alokasi (2023)** |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan kelembagaan dan strategi efektifitas kebijakan pengentasan kemiskinan | Rp4.936.200.399 |

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (2023) | Alokasi (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Volume Usaha Koperasi | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi | 6,25% | Rp. 386.887.400 |
| 2 | Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas | Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro | 6,00% | Rp. 225.012.900 |
| 3 | Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern | Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern | 7,00% | Rp. 189.770.500 |

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

| No. | Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | Uraian (Output) | Target | |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **4.134.529.599** |
| 1.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | | **24.097.000** |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | 11.555.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.990.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.640.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.640.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.640.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 Laporan | 1.640.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 1.992.000 |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai | | **2.798.517.000** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 orang/ bulan | 2.794.937.000 |
| | Koordinasi dan | Jumlah Laporan | 18 | 3.580.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui | | **11.808.500** |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 laporan | 5.808.500 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan penatausahaan barang | 3 Laporan | 6.000.000 |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai | | **23.260.000** |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | 1 unit | 2.400.000 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 20.860.000 |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan | | **310.431.500** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 8.845.500 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 paket | 3.188.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 6 Laporan | 56.824.550 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 56.686.500 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 2 dokumen | 2.400.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Fasilitasi | 5 Lapora | 2.250.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tamu | Kunjungan Tamu | n | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 laporan | 171.273.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 3 dokumen | 6.563.950 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 Dokumen | 2.400.000 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | | **300.595.899** |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 13 Unit | - |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 6 unit | 127.919.600 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 6 unit | 104.464.200 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 8 unit | 28.704.899 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 5 unit | 39.507.200 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | | **384.687.000** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat | 2 laporan | 6.520.000 |
| | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | 78.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 7 laporan | 300.167.000 |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | | **281.132.700** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | |
| | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 5 unit | 41.523.400 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 5 unit | 60.509.300 |
| | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 2.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 17.250.000 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 100.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi | 1 unit | 59.850.000 |
| | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Diawasi | 20 % | **131.551.700** |
| | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Diawasi | 205 koperasi | **131.551.700** |
| | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan | jumlah koperasi yangtelah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan | 20 unit usaha | 83.738.200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota | kabupaten/kota | | |
| | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja | 50 unit usaha | 47.813.500 |
| | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI** | Persentase Koperasi yang Dinilai | 21 % | **116.650.000** |
| | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Koperasi yang Dinilai | | **116.650.000** |
| | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 100 unit usaha | 51.050.000 |
| | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang mendapatakan penghargaan kesehatan | 9 unit usaha | 65.600.000 |
| | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | 15 % | **111.285.000** |
| | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | | **111.285.000** |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 100 orang | 111.285.000 |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Persentasi koperasi yang di fasilitasi | 21 % | **27.400.700** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase pengurus/ Pengawas koperasi yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | **27.400.700** |
| | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 20 unit usaha | 27.400.700 |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO** | Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | | **189.770.500** |
| | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi tentang pengetahuan dan kewirausahaan | | **189.770.500** |
| | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan IUM | 160 unit usaha | 104.516.000 |
| | Pemberdayaan Melalui | Jumlah Usaha Mikro | 1 unit | 38.395.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kemitraan Usaha Mikro | yang di Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro | usaha | |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM | Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 2 unit usaha | 39.318.500 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM | Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mempunyai Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir | 20 orang | 7.541.000 |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan | | **225.012.900** |
| | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan | | **225.012.900** |
| | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi | Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan | 4 unit usaha | 225.012.900 |

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

| No. | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Jenis Belanja | Sasaran Penerima Manfaat | | | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nama Objek | Jumlah | Rincian | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nihil

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI